



# Rencana Kerja

Tahun 2025

Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Barat

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Rencana Kerja Tahunan merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran selama tahun 2025 pada Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Semoga Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini dapat mendorong upaya yang terstruktur, sistemik dan masif dalam memberikan pelayanan yang signifikan kepada umat khususnya pada layanan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama.

Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim kerja yang telah berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan serta semua pihak yang telah mendukung dan bekerjasama dalam penyusunan untuk kesempurnaan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini. Dan pada akhirnya, semoga menjadi bagian dari amal kebajikan yang membawa manfaat bagi kita semua.

Mamuju, 8 Januari 2025

Kepala



Adhan Nota

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	1
B. Dasar Hukum .....	8
C. Maksud dan Tujuan .....	10
D. Faktor Kunci Keberhasilan .....	10
E. Lingkungan Yang Berpengaruh .....	12
BAB II RENCANA KERJA .....	13
A. Sasaran Kerja / Kegiatan .....	13
B. Program Kegiatan .....	19
BAB III ANGGARAN .....	37
A. Jumlah Anggaran .....	37
B. Jumlah Anggaran Per Satuan Kerja .....	37
C. Rencana Penyerapan Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP .....	41
DAFTAR TABEL .....	iii

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 .....	36
Tabel 2.	Pagu Anggaran Tahun 2025 .....	37
Tabel 3.	Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Semester I .....	38
Tabel 4.	Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2025 <sup>1</sup> Semester II .....	39

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama disebutkan pada Pasal 4 bahwa : ***Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan Madrasah;
- c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
- d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Pembimbing Masyarakat Kristen;
- g. Pembimbing Masyarakat Katolik;
- h. Pembimbing Masyarakat Hindu;
- i. Pembimbing Masyarakat Buddha;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;

- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
  - d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
  - e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan
  - f. orang asing;
  - g. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama;
  - h. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
  - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama.
2. Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;
  - b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;
  - c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
  - d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  - b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  - c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan
  - d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
  - b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
  - c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
  - d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
  - b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional Bimbingan Masyarakat Islam;

- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam;
  - d. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
6. Pembimbing Masyarakat Kristen bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  7. Pembimbing Masyarakat Katolik bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  8. Pembimbing Masyarakat Hindu bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  9. Pembimbing Masyarakat Buddha bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan

pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sebagai salah satu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada di Indonesia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kanwil dan dibantu oleh 9 (Sembilan) Eselon III.

Adapun Rencana Kerja Tahunan untuk tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / Rincian Kertas kerja satker, adalah sebagai berikut:

#### SEKRETARIAT JENDERAL

- 025.01.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
  - 5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- 025.01.WA Program Dukungan Manajemen
  - 2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
  - 2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
  - 2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
  - 2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
  - 2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan
  - 2103 Pembinaan Administrasi Umum
  - 2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan kehumasan
  - 6708 Dukungan Manajemen Pendidikan

#### BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

- 025.03.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
  - 2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
  - 2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
  - 2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
  - 2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- 025.03.WA Program Dukungan Manajemen

2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Bimas Islam

#### PENDIDIKAN ISLAM

025.04.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

025.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga  
Kependidikan Madrasah

4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah

4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam

025.04.WA Program Dukungan Manajemen

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis  
Lainnya Pendidikan Islam

#### BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

025.05.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

025.05.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen

025.05.WA Program Dukungan Manajemen

2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Bimas Kristen

5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas  
Kristen

#### BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

025.06.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

025.06.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

- 2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
- 025.06.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
- 025.06.WA Program Dukungan Manajemen
- 2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
- 5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

#### BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

- 025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
- 025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
- 025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
- 025.07.WA Program Dukungan Manajemen
- 5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

#### BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

- 025.08.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
- 025.08.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
- 025.08.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
- 025.08.WA Program Dukungan Manajemen
- 2146 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha

5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

#### PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri

2148 Pembinaan Haji

025.09.WA Program Dukungan Manajemen

2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

#### **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2025;
12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025;
14. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2025;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029
18. Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
19. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan mutu kinerja dan integritas aparatur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang agama;
- d. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan.
- e. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil Kemenag Tahun 2025
- f. Menjamin kesinambungan kinerja organisasi pada masa transisi Renstra
- g. Menyelaraskan perencanaan Kanwil dengan arah kebijakan nasional dan prioritas Kementerian Agama

### **D. Faktor Kunci Keberhasilan**

1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia umumnya dan Sulawesi Barat pada khususnya dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada.
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.
3. Telah terbentuknya FKUB di Provinsi Sulawesi Barat dan 6 (enam) Kabupaten di Sulawesi Barat.
4. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah /wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

5. Keberadaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama.
6. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
7. Tersedianya struktur organisasi Kemenag yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan.
8. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen menyebarkan pemberitaan.
9. Tersedianya peraturan perundang - undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Provinsi Sulawesi Barat.
10. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing.
11. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK.
12. Tingginya peran masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan ibadah haji yang dipresentasikan melalui berkembangnya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan KBIH.
13. Adanya Kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.
14. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan.
15. Tersedianya pedoman/SOP kinerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
16. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan dan evaluasi pengawas sudah berjalan.

17. Sebagian besar guru agama sudah bersertifikasi.
18. Meningkatnya prestasi santri diberbagai event nasional.
19. Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dalam mendukung terselenggaranya pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan.

#### **E. Lingkungan yang berpengaruh**

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2025 melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcome program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif antara lain, belanja perjalanan dinas dan konsinyering;
3. Meningkatkan peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kementerian Negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
4. Penerapan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM-SPAN) agar pengelolaan keuangan Negara dapat dilakukan dengan lebih baik;
5. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun pada masa peralihan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020–2024 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Tahun 2025 menjadi tahun transisi yang strategis karena sekaligus berfungsi sebagai tahun awal implementasi arah kebijakan Renstra baru, namun tetap memperhatikan keberlanjutan capaian kinerja Renstra sebelumnya.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta pembinaan kehidupan beragama yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi geografis, sosial, dan budaya Sulawesi Barat yang beragam menuntut perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun mengacu pada Arah kebijakan dan rancangan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang memuat Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja tahun 2025. Penyusunan ini bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen untuk melaksanakan program demi pencapaian sasaran yang telah terumuskan.

#### **A. Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat memiliki dua bidang sasaran yaitu sasaran terkait bidang agama dan bidang pendidikan. Selanjutnya secara lebih lengkap Sasaran Kegiatan,

Indikator Kinerja dan Target Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	a. Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	80%
		b. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	75
2.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	a. Nilai kesalehan umat beragama pada kanwil dengan kategori tinggi	80
		b. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	80%
		c. Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	100%
3.	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan lembaga keagamaan	Persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	80%
4.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	100%
		b. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	50%
		c. Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	50%
		d. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	2%
5.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Persentase MoU, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	50%
		b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 5
		c. Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	54%

6.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	a. Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	90%
		b. Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	50%
7.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	50%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi	3 KUA
		b. Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	23%
		c. Presentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	60%
		d. Presentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	80%
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	98%
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Presentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	83%
		b. Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	90
11.	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji	a. Presentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	80%
		b. Presentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100%
12.	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	a. Presentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	10%
		b. Presentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	25%
13.	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	a. Presentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	30%
		b. Presentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan	5%

		profesional	
		c. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	70%
14.	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi Standar sarpras	47,5%
		b. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	5%
		c. Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	85%
15.	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/sederajat	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	100%
16.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Rata-rata nilai asesmen tingkat Provinsi : a. Literasi b. Numerasi	80 80
		b. Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/sekolah/widyalyaya/widya dharma	80
		c. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	80
17.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	a. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	90%
		b. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	100%
18.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalyaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	30%
		b. Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	40%

		c. Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	35%
		d. Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	30%
		e. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	100%
		f. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,42%
19.	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100%
20	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	30%
		b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	75%
21.	Meningkatnya kepeloporan dan sukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	17 ekskul
		b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	17 gugus
22.	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalyaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	3,7%
23.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	99,5%
		b. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	43,1%
		c. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	38,6%
		d. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	3,8%
		e. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	81,5%

		f. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	30%
		g. Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	31.3%
		h. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	20%
		i. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	53%
		j. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	50%
		k. Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	9%
		l. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	3%
24.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		b. Persentase dokumen perencanaan yang di susun sesuai standar	100%
		c. Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	12%
		d. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80%
		e. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	55%
		f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95
		g. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	50%
		h. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	6 Laporan

	i. Indeks Profesionalisme ASN	80
	j. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100%
	k. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3%
	l. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	23%
	m. Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	82
	n. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100%
	o. Persentase rekomendasi izin orang asing	100%
	p. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di counter	12%
	q. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	85%
	r. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	70%
	s. Persentase Digitalisasi arsip yang mudah diakses	90%

## B. Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

### **SEKRETARIAT JENDERAL**

025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
5620 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
5620 QDB 001	FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik
051	Bantuan Desa Sadar Kerukunan
054	Operasional FKUB Tingkat Provinsi
5620 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

5620 QDC 002	Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional
052	Kampanye dan Publikasi Kerukunan
053	Pokja Kerukunan
054	Koordinasi Tugas dan Fungsi KUB
055	Layanan Penatausahaan
056	Pembinaan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2098 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2098 EBA 957	Layanan Hukum
052	Koordinasi Penyusunan Produk Hukum
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian
2099 EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
2099 EBC 954	Layanan Manajemen SDM
052	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai
054	Pengembangan Pegawai
058	Pembinaan Kepegawaian
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
2100 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2100 EBA 994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
2100 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
2100 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Penyusunan Laporan Keuangan
052	Pengelolaan Perbendaharaan
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
2101 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2101 EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
052	Tatalaksana Organisasi/Kelembagaan
2101 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
2101 EBD 961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan
2102 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
2102 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program
052	Penyusunan Anggaran

2103	Pembinaan Administrasi Umum
2103 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2103 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2103 EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2103 EBB 951	Layanan Sarana Internal
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
052	Pengadaan Peralatan dan Mesin
054	Pengadaan Perangkat Pengolah Data
2103 EBB 971	Layanan Prasarana Internal
051	Rehab Gedung dan Bangunan
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan kehumasan
2106 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2106 EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Hubungan Masyarakat
2106 EBA 963	Layanan Data dan Informasi
052	Pengolahan Data dan Informasi
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan
6708 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6708 EBA 994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

#### **BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
2104 QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
2104 QAA 002	Layanan Nikah dan Rujuk
054	Fasilitasi Tugas dan Fungsi KUA
2104 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2104 QDC 001	Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya
051	Pemetaan Kompetensi
052	Pembinaan Penghulu
2104 QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
2104 QDE 001	Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
051	Bimbingan Keluarga Sakinah

2104 QDE	002	Bimbingan Keluarga Sakinah - Maslahat
	051	Bimbingan Keluarga Sakinah
2104 UAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
2104 UAI	002	KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana
	054	Sarana KUA
2104 UAI	003	KUA yang Dibangun (SBSN)
	051	Pembangunan KUA
2104 UAI	004	KUA Rusak Sedang dan Berat Direhabilitasi
	051	Rehabilitasi KUA
2104 UAI	005	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)
	051	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)
2122		Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
2122 BBC		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat
2122 BBC	001	Layanan Advokasi Aset Wakaf
	051	Mutasi Harta Benda Wakaf
	052	Advokasi
2122 PDE		Akreditasi Lembaga
2122 PDE	001	Lembaga Zakat yang Terakreditasi
	051	Lembaga Zakat yang Terakreditasi
2122 QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2122 QDB	001	Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan
	051	Bina Lembaga
	054	Fasilitasi Kelembagaa
	055	Literasi Zakat dan Wakaf
2122 QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2122 QDD	001	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF
	051	Kampung Zakat
	052	Pemberdayaan Ekonomi Umat
	053	Wakaf Produktif
2123		Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
2123 AEG		Konferensi dan Event
2123 AEG	001	Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Islam
	051	Seni Budaya Islam
	052	Hari Besar Islam
2123 PEG		Konferensi dan Event
2123 PEG	001	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)

	052	Even Keagamaan Tingkat Propinsi
	055	LPTQ Terbina
2123 QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2123 QDC 002		Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya
	051	Pembinaan Penyuluh
2123 QDC 003		Penyuluh Agama Islam Aktif dalam Konten Digital Inklusif Transformatif
	051	Kompetensi
2123 QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2123 QDD 001		Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam
	051	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
2123 QDD 002		Majelis Taklim yang Dibina
	051	Pembinaan SDM/Pengurus
	052	Bantuan Operasional Majelis Taklim
2123 QEI		Bantuan Lembaga
2123 QEI 002		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan
	051	Lembaga Dakwah yang Terbina
	053	Organisasi Sosial Keagamaan yang Terbina
2124		Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
2124 QAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
2124 QAB 001		Perpustakaan Masjid yang dibina
	051	Pembinaan Pustaka Keagamaan Islam
2124 QAH		Pelayanan Publik Lainnya
2124 QAH 001		Layanan Literasi Keagamaan Islam Digital
	052	Pengendalian Mutu Buku dan Naskah Keagamaan Islam
2124 QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2124 QDD 001		Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam
	052	Pembinaan paham keagamaan
	053	Advokasi dan penanganan konflik
2124 QEI		Bantuan Lembaga
2124 QEI 001		Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan
	059	Pembinaan Kemakmuran dan Standarisasi Masjid
	061	Pembinaan Manajemen Masjid
	063	Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid
2124 QMB		Komunikasi Publik
2124 QMB 001		Layanan Syariah dan Hisab Rukyat

	051	Layanan Syariah
	052	Pengelolaan Hisab Rukyat
025.03.WA		Program Dukungan Manajemen
2125		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
2125 EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
2125 EBA	994	Layanan Perkantoran
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

#### **PENDIDIKAN ISLAM**

025.04.DF		Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
2128		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
2128 QEI		Bantuan Lembaga
2128 QEI	001	Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
2129		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
2129 RBI		Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
2129 RBI	001	Prasarana Madrasah Pemenuhan SPM
	056	Revitalisasi Madrasah Negeri
2129 RBI	002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)
	051	Peningkatan Prasarana Madrasah (SBSN)
025.04.DI		Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
2127		Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
2127 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2127 QEK	001	Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
2127 QEK	002	Insentif Guru PAI Non PNS
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
2133		Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
2133 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2133 QEK	005	Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
4433		Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
4433 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4433 QEK	001	Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif

004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
2135 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2135 EBA 956	Layanan BMN
051	Layanan BMN
2135 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2135 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
2135 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
2137 PEG	Konferensi dan Event
2137 PEG 001	Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi)
051	Penyelenggaraan Event Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama Kristen
2137 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2137 QDB 001	Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi
051	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan Kristen
052	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Budaya Keagamaan Kristen
2137 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2137 QDC 002	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya
051	Pembinaan Penyuluh Agama Kristen
2137 QDC 003	Penyuluh Agama Kristen yang aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif
051	Sosialisasi/Konsultasi/Pembinaan Penyuluh Agama Kristen terkait konten digital
2137 QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2137 QDD 001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Kristen
051	Pelaksanaan Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen dan Pembinaan Moderasi Beragama Kristen
2137 QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga

2137 QDE 001	Bimbingan Keluarga Kristiani
051	Pembinaan Keluarga Kristiani
2137 QEG	Bantuan Peralatan / Sarana
2137 QEG 001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan
051	Penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya
052	Penyediaan Sarana Peribadatan Lainnya
2137 QEI	Bantuan Lembaga
2137 QEI 002	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan
051	Pemberian Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah
052	Pemberian Bantuan Operasional Rumah Ibadah Kristen
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
2136 QEG	Bantuan Peralatan / Sarana
2136 QEG 001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah
051	Penyediaan Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Dasar dan Menengah
2136 QEI	Bantuan Lembaga
2136 QEI 001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta
051	Bantuan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta
2136 QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2136 QEK 001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
2136 QEK 004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
4434 PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
4434 PBH 001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan
051	Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum/Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen
4434 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4434 QDB 001	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya

	051	Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen
4434 QEI		Bantuan Lembaga
4434 QEI	001	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan
	051	Pembinaan dan Pengembangan POKJAWAS/KKG/MGMP
4434 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4434 QEK	001	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
4434 SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
4434 SCI	001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya
	051	Pembinaan Guru dalam rangka Peningkatan Kompetensi Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
025.05.WA		Program Dukungan Manajemen
2138		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
2138 EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
2138 EBA	994	Layanan Perkantoran
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5100		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
5100 CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5100 CAN	951	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	051	Pengadaan Perangkat TIK
5100 EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
5100 EBA	994	Layanan Perkantoran
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5100 EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal
5100 EBB	951	Layanan Sarana Internal
	051	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK</b>		
025.06.DC		Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2140		Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
2140 PEG		Konferensi dan Event

2140 PEG 001	Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)
051	Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
2140 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2140 QDB 002	Lembaga Sosial Keagamaan yang Dibina
052	Pembinaan LP3K
053	Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik Lainnya
2140 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2140 QDC 001	Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan
051	Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non ASN
2140 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2140 QDC 002	Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya
051	Pembinaan Penyuluh Agama Katolik
052	Kelompok Kerja Penyuluh Agama Katolik yang diberikan Fasilitasi dan Pembinaan
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
2140 QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2140 QDD 001	Kelompok Kategorial Katolik yang diberikan Fasilitasi dan Pembinaan
051	Fasilitasi dan Pembinaan Kepada Kelompok Kategorial Katolik
2140 QDD 002	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Katolik
051	Pelaksanaan Dialog Kerukunan Intern dan Moderasi Umat Katolik
2140 QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
2140 QDE 001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia
051	Fasilitasi dan Pembinaan Bimbingan Keluarga Katolik
2140 QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
2140 QDE 002	Calon Pengantin Katolik memperoleh Bimbingan Perkawinan
051	Fasilitasi dan Pembinaan Pra Nikah/ Calon Pengantin Katolik
2140 QEG	Bantuan Peralatan / Sarana
2140 QEG 002	Kitab suci dan sarana peribadatan Agama Katolik yang disediakan
051	Pemberian Bantuan Kitab Suci
052	Pemberian Bantuan Buku Rohani
2140 QEI	Bantuan Lembaga

2140 QEI	009	Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan
	051	Fasilitasi Rumah Ibadah/ Biara/ Tempat Ibadah
2140 QEI	010	Bantuan Operasional Lembaga Agama Katolik (KWI)
	051	Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Agama Katolik (KWI)
025.06.DF		Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
2139		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
2139 QEG		Bantuan Peralatan / Sarana
2139 QEG	001	Sarana Lembaga pendidikan keagamaan
	052	Pemberian Bantuan Sarana pada Taman Seminari
2139 QEI		Bantuan Lembaga
2139 QEI	007	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan bantuan
	051	Fasilitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik
025.06.DI		Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4435		Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
4435 QEI		Bantuan Lembaga
4435 QEI	005	POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan
	051	Pemberian Bantuan KKG Katolik
	052	Pemberian Bantuan MGMP Katolik
4435 QEI		Bantuan Lembaga
4435 QEI	007	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Ditingkatkan Mutunya
	052	Pelaksanaan Akreditasi PAUD Taman Seminari
4435 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4435 QEK	001	Guru Agama Non ASN Penerima Insentif
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
4435 QEK	003	Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profesi
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
4435 QEK	005	Siswa beragama katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan
	051	Pembinaan Siswa Katolik Tingkat Menengah
	052	Pembinaan Siswa Katolik Tingkat Dasar
	053	Pembinaan Siswa PAUD Taman Seminari
4435 SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
4435 SCI	001	Pendidik dan Tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya
	051	Peningkatan Kompetensi Guru PAK Tingkat Menengah
	055	Peningkatan Kompetensi Guru PAK Pendidikan Tingkat Dasar

025.06.WA	Program Dukungan Manajemen
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
2141 CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2141 CAN 997	Pengadaan Perangkat TIK
051	Pengadaan Perangkat TIK
2141 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2141 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
5102 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5102 EBA 956	Layanan BMN
051	Pelayanan Perlengkapan dan BMN
5102 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5102 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
5102 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Penyusunan Laporan Keuangan
052	Pengelolaan Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran

#### **BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
2143 PEG	Konferensi dan Event
2143 PEG 001	Event seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)
052	Pembinaan Dharma Gita
2143 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2143 QDB 001	Lembaga Sosial Keagamaan Hindu Yang Dibina
052	Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan
2143 QDB 002	Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan
051	Pembinaan Lembaga Dana Punia Masyarakat
2143 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2143 QDC 001	Penyuluh Agama Hindu Non ASN Penerima Tunjangan
051	Pemberian Tunjangan Penyuluh Non ASN

2143 QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2143 QDD 001	Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu
051	Pembinaan Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu
2143 QDD 002	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Hindu
051	Penyelenggaraan Dialog Kerukunan Pandita/Pinandita/Tokoh agama/Cendikiawan/Tokoh Masyarakat Hindu
2143 QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
2143 QDE 001	Bimbingan Keluarga Sukinah
051	Pembinaan Keluarga Sukinah
052	Pembinaan Pranikah pada Remaja/Pemuda
2143 QEI	Bantuan Lembaga
2143 QEI 003	Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan
051	Pemberian Bantuan Pembangunan/ Rahabilitasi Rumah Ibadah
052	Pemberian Bantuan Operasional Rumah Ibadah
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
2142 QEI	Bantuan Lembaga
2142 QEI 001	Lembaga Pendidikan Widyalyaya yang diberikan bantuan
051	Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Lembaga Pendidikan WidyaLaya
2142 QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2142 QEK 007	Siswa penerima BOS Tk Pratama
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
4436 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4436 QDB 001	Lembaga Pendidikan Widyalyaya, Pasraman dan Sekolah Minggu yang ditingkatkan mutunya
052	Penjaminan Mutu Pendidikan Widyalyaya, Pasraman dan Sekolah Minggu
4436 QEI	Bantuan Lembaga
4436 QEI 001	POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan
051	Bantuan Kepada POKJAWAS/KKG/MGMP
4436 QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4436 QEK 001	Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

4436 QEK 002	Guru Non ASN Penerima Insentif
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
4436 SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan
4436 SCI 001	Guru Agama Hindu dan Guru pada Satuan Pendidikan Widyalyaya yang ditingkatkan kompetensinya
051	Pembinaan Guru Agama Hindu dan Guru pada satuan pendidikan Widyalyaya dalam Melaksanakan Kurikulum Program Dukungan Manajemen
025.07.WA 5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
5103 CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5103 CAN 951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan
051	Pengadaan Perangkat TIK
5103 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5103 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5103 EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
5103 EBB 951	Layanan Sarana Internal
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5103 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
5103 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran

#### **BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
2145 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2145 QDB 002	Lembaga Sosial Keagamaan Buddha yang Dibina
052	Penguatan Moderasi Lembaga Keagamaan Buddha
053	Monitoring dan Evaluasi/ Bimbingan Teknis/ Pembinaan OKB
2145 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2145 QDC 001	Penyuluh Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan
051	Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non ASN
2145 QDC 002	Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya
052	Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh Agama Buddha Non PNS
053	Fasilitasi Kelompok Kerja Penyuluh

	055	Pemantauan/ Monitoring/ Evaluasi/ Penyuluh Agama Buddha
2145 QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
2145 QDD 001		Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha
	051	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha
	052	Penguatan Forum Kerukunan Umat Buddha
2145 QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
2145 QDE 001		Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya
	051	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya
2145 QEG		Bantuan Peralatan / Sarana
2145 QEG 001		Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha yang Disediakan
	051	Penyediaan Kitab Suci Agama Buddha
2145 QEI		Bantuan Lembaga
2145 QEI 001		Bantuan Lembaga Agama Buddha
	051	Bantuan Sinergi Program Lembaga Agama Buddha/ Lembaga Sosial Keagamaan Buddha
	052	Pemantauan/ Monitoring/ Bimbingan Teknis/ Pembinaan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha
2145 QEI 003		Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan
	051	Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah Agama Buddha
	052	Rehabilitasi/ Renovasi Rumah Ibadah Agama Buddha
	056	Monitoring dan Evaluasi/ Bimbingan Teknis/ Pembinaan RIAB
025.08.DF		Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
4012		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
4012 QEI		Bantuan Lembaga
4012 QEI 001		Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional
	051	Bantuan Operasional Sekolah Minggu Buddha
4012 QEI 002		Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Prasarana
	051	Bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Sekolah Minggu Buddha
	057	Pemantauan/ Monitoring/ Evaluasi/ Visitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
025.08.DI		Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4437		Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
4437 PEF		Sosialisasi dan Diseminasi

4437 PEF	001	Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan
	051	Pembinaan Sippa Dhamma Samajja
4437 QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4437 QDB	001	Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya
	052	Pembinaan Manajemen Sekolah Minggu Buddha
4437 QEI		Bantuan Lembaga
4437 QEI	001	POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha Penerima Bantuan
	051	Bantuan Operasional KKG
4437 QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4437 QEK	001	Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Insentif
	004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
025.08.WA		Program Dukungan Manajemen
2146		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha
2146 EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2146 EBB	951	Layanan Sarana Internal
	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5105		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
5105 EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
5105 EBA	994	Layanan Perkantoran
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH</b>		
025.09.DC		Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2126		Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
2126 QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2126 QDB	001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina
	054	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
2147		Pelayanan Haji Dalam Negeri
2147 QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
2147 QAA	001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri
	054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler
	057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji

061	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah
2147 QAH	Pelayanan Publik Lainnya
2147 QAH 001	Asrama Haji yang Profesional Melayani
051	Penyiapan Asrama Haji
2147 QAH 002	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani - SBSN
051	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
2148	Pembinaan Haji
2148 QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2148 QDC 001	Petugas Haji yang Profesional
051	Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji
052	Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji
054	Operasional Petugas Haji
2148 QDC 002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2150 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2150 EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah
2150 EBA 962	Layanan Umum
052	Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
2150 EBA 994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2150 EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2150 EBB 951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
2150 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
2150 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran
052	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran
2150 EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Evaluasi dan Pelaporan Program
2150 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan
054	Pengelolaan PNBPN

## BAB III ANGGARAN

### A. Jumlah Anggaran

Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 berdasarkan DIPA 2025 sebesar Rp. 109.378.921.000,- (Seratus Sembilan Milyar Tuga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.46.903.104.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Empat Rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 25.771.272.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 36.493.945.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 210.600.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**Tabel. 2  
PAGU ANGGARAN  
BERDASARKAN JENIS BELANJA  
TAHUN 2025**

No	PROGRAM /ESELON I	Jenis Belanja				TOTAL
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	28.451.338.000	8.473.957.000	4.643.400.000	-	41.568.695.000
2	BIMAS ISLAM	-	3.538.414.000	5.810.000.000	-	9.348.414.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	17.665.766.000	5.248.640.000	19.381.000.000	-	42.295.406.000
4	BIMAS KRISTEN	78.000.0000	1.955.990.000	86.000.000	210.600.000	2.330.590.000
5	BIMAS KATOLIK	519.000.000	1.607.107.000	15.000.000	-	2.141.107.000
6	BIMAS HINDU	117.000.000	2.079.203.000	12.500.000	-	2.208.703.000
7	BIMAS BUDDHA	72.000.000	683.870.000	5.000.000	-	760.870.000
8	P. HAJI DAN UMRAH	-	2.184.091.000	6.541.045.000	-	8.725.136.000
TOTAL		46.903.104.000	25.771.272.000	36.493.945.000	210.600.000	109.378.921.000

### B. Jumlah Anggaran per Satuan Kerja

Anggaran per DIPA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**PAGU ANGGARAN TAHUN 2025**

No	PROGRAM /ESELON I	TOTAL
1	SEKRETARIAT JENDERAL	41.568.695.000
2	BIMAS ISLAM	9.348.414.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	42.295.406.000
4	BIMAS KRISTEN	2.330.590.000
5	BIMAS KATOLIK	2.141.107.000
6	BIMAS HINDU	2.208.703.000
7	BIMAS BUDDHA	760.870.000
8	P. HAJI DAN UMRAH	8.725.136.000
TOTAL		109.378.921.000

**C. Rencana Penyerapan Anggaran**

Rencana penyerapan anggaran pada tahun 2025 tercantum pada Tabel 3 dan 4, sebagai berikut :

**TABEL. 4**  
**RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025**  
**SEMESTER I**  
**(JANUARI S.D JUNI 2025)**

No	PROGRAM /ESELON I	PAGU DIPA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	SEKRETARIAT JENDERAL	41.568.695.000	986.161.000	4.057.374.000	4.536.286.000	3.888.705.000	3.446.057.000	3.846.492.000
2	BIMAS ISLAM	9.348.414.000	30.809.000	217.809.000	351.553.000	556.519.000	637.596.000	963.400.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	42.295.406.000	95.531.000	5.774.398.981	1.655.816.107	4.136.614.938	5.014.154.417	4.700.186.136
4	BIMAS KRISTEN	2.330.590.000	-	36.958.000	469.475.000	631.050.000	309.711.000	53.442.000
5	BIMAS KATOLIK	2.141.107.000	152.357.000	236.969.000	748.732.000	110.452.000	159.846.000	195.616.000
6	BIMAS HINDU	2.208.703.000	87.709.000	834.678.000	195.357.000	224.618.000	69.765.000	117.381.000
7	BIMAS BUDDHA	760.870.000	-	226.254.000	157.000.000	41.527.000	77.044.000	78.573.000
8	P. HAJI DAN UMRAH	8.725.136.000	44.162.000	80.229.000	132.700.000	468.651.000	187.300.000	343.037.000
<b>TOTAL</b>		<b>109.378.921.000</b>	<b>1.396.729.000</b>	<b>11.464.669.981</b>	<b>8.246.919.107</b>	<b>10.058.136.938</b>	<b>9.901.473.417</b>	<b>10.298.127.136</b>

**TABEL. 5**  
**RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025**  
**SEMESTER II**  
**(JULI S.D DESEMBER 2025)**

No	PROGRAM /ESELON I	PAGU DIPA	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	SEKRETARIAT JENDERAL	41.568.695.000	3.160.507.000	6.005.254.000	2.829.268.000	3.074.461.000	2.858.301.000	2.879.830.000
2	BIMAS ISLAM	9.348.414.000	1.201.995.000	1.208.902.000	1.558.948.000	1.918.039.000	534.096.000	168.747.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	42.295.406.000	4.336.014.797	4.382.301.774	4.318.320.182	4.139.366.525	2.841.859.829	900.841.314
4	BIMAS KRISTEN	2.330.590.000	409.565.000	187.100.000	101.500.000	61.500.000	54.500.000	15.789.000
5	BIMAS KATOLIK	2.141.107.000	144.176.000	100.962.000	51.354.000	49.405.000	46.150.000	145.088.000
6	BIMAS HINDU	2.208.703.000	368.895.000	42.296.000	44.024.000	47.223.000	50.016.000	126.741.000
7	BIMAS BUDDHA	760.870.000	34.639.000	24.442.000	33.386.000	31.265.000	21.650.000	35.090.000
8	P. HAJI DAN UMRAH	8.725.136.000	154.346.000	260.815.000	459.323.000	5.996.165.000	457.251.000	141.159.000
<b>TOTAL</b>		<b>109.378.921.000</b>	<b>9.810.137.797</b>	<b>12.212.072.774</b>	<b>9.396.123.182</b>	<b>15.317.424.525</b>	<b>6.863.823.829</b>	<b>4.413.285.314</b>

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen yang digunakan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan organisasi dalam hal ini Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang akan dijalankan dalam Satu tahun anggaran dan dokumen rencana kinerja menjadi pedoman bagi segenap penanggung jawab program dan kegiatan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik (*good government*) di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Satker Kanwil Kementerian Agama tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang berorientasi pada apa yang telah ditetapkan di Perencanaan Kinerja 2025. Untuk itu diperlukan komitmen bersama menjadikan pengawasan sebagai media korektif yang inovatif guna membangun kinerja organisasi.

Akhirnya dengan tersusun Rencana Kerja Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang agama dan pendidikan keagamaan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara efektif dan efisien sehingga dapat tepat output, tepat sasaran dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.